

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, secara ideal mengandalkan institusi-institusi formal seperti partai politik, lembaga legislatif, dan proses pemilihan umum yang transparan. Namun, dalam praktiknya, terutama di tingkat lokal, dinamika politik seringkali jauh lebih kompleks dan tidak hanya dibentuk oleh aturan main formal. Di banyak masyarakat, kekuatan-kekuatan informal, yang bersumber dari tradisi, budaya, maupun struktur sosial yang sudah mengakar, turut memainkan peran krusial dalam membentuk lanskap politik dan bahkan menentukan arah demokrasi itu sendiri. Fenomena (Aspinall & Berenschot, 2019). ini menjadi sangat relevan dalam konteks Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), yang merupakan arena kontestasi langsung antara berbagai kekuatan politik untuk memperebutkan legitimasi dan kekuasaan di tingkat daerah.

Indonesia, dengan keragaman budaya dan sosialnya yang kaya, menampilkan berbagai corak kekuasaan informal yang berinteraksi dengan sistem demokrasi. Salah satu wilayah yang menunjukkan interaksi yang sangat khas dan menarik adalah Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan. Masyarakat Madura dikenal memiliki struktur sosial yang kuat dengan kehadiran tokoh-tokoh sentral yang memiliki pengaruh besar. Dalam konteks politik lokal, dua figur yang secara historis dan sosiologis memiliki peran signifikan adalah kiai dan blater. (Suyatno, 2020).

Di tengah keragaman sosial dan politik Indonesia, sosok Kiai di Madura, terutama di Bangkalan, berperan penting sebagai pilar utama yang pengaruhnya melampaui sekadar aspek religius. Kiai merupakan pemimpin spiritual dan pemikir Islam yang karismanya berakar pada pengetahuan agama yang mendalam, keteladanan pribadi, serta sering kali berasal dari garis keturunan yang dihormati. Peran mereka bersifat beragam mereka tidak hanya sebagai pengajar dan pembimbing utama dalam pendidikan Islam melalui pesantren dan majelis taklim, tetapi juga berfungsi sebagai penasihat etis, mediator dalam konflik, dan tiang

penyangga masyarakat. Kiai menjadi sumber utama bagi masyarakat dalam mencari fatwa keagamaan, petunjuk etika hidup, serta solusi atas berbagai masalah sosial dan pribadi. Ketulusan santri dan alumni pesantren terhadap Kiai mereka menciptakan jejaring sosial yang luas dan kokoh, yang membangun fondasi komunitas yang terorganisir dengan baik. Dengan peran-peran ini, Kiai secara alami menjadi pembentuk opini publik dan otoritas yang diakui, menjadikannya sosok yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Madura sehari-hari.

Pengaruh Kiai di Bangkalan dapat meluas hingga ke bidang politik praktis, berpotensi menentukan hasil Pilkada, karena berbagai faktor yang unik. Pertama, masyarakat Madura dikenal sangat religius, sehingga nasihat dan ajaran Kiai dianggap sebagai kebenaran agama yang wajib diikuti untuk mendapatkan berkah di dunia dan akhirat. Keyakinan ini memberikan kekuatan legitimasi agama yang kuat kepada Kiai. Kedua, banyak Kiai memiliki daya tarik pribadi yang besar, sering kali diperkuat oleh keyakinan masyarakat bahwa Kiai membawa barokah. Dukungan Kiai dipercaya akan mendatangkan kebaikan. Ketiga, jaringan pesantren di Bangkalan sudah ada selama bertahun-tahun, menciptakan alumni yang loyal dan tersebar luas, sehingga membentuk "mesin" mobilisasi yang efektif ketika Kiai memberikan arahan politik. Keempat, Kiai mengisi kekosongan dalam peran mediasi dan kepemimpinan yang mungkin tidak diisi dengan baik oleh lembaga negara, menjadikan mereka sosok yang paling dipercaya. Terakhir, para politisi lokal menyadari akan kekuatan ini, sehingga mereka secara aktif mencari dukungan dari Kiai dengan cara melakukan kunjungan, memberikan sumbangan, atau menawarkan janji politik, yang semakin menguatkan posisi Kiai sebagai aktor penting di dunia politik bahkan sebagai pengubah permainan dalam kompetisi pemilihan. (Suyatno, 2020).

Selain Kiai sebagai otoritas moral-keagamaan, struktur kekuasaan lokal di Bangkalan juga ditopang oleh aktor non-formal lain yang memiliki pengaruh signifikan dalam politik praktis, yakni **Blater**. Kehadiran blater memperlihatkan bahwa mobilisasi politik di Madura tidak hanya bergerak melalui legitimasi agama, tetapi juga melalui jaringan kekuatan sosial yang bekerja di luar mekanisme formal. Di Madura, sosok blater bukan sekadar mitos, melainkan realitas sosial dengan rekam jejak empiris yang kuat dalam membentuk dinamika masyarakat. Blater,

yang secara harfiah berarti "pandai bersosialisasi", dalam praktiknya di Madura (terutama dalam konteks sosial-politik) Blater Lebih umum dipakai untuk menyebut **jagoan/orang kuat lokal** (Moehyat 2024) sesungguhnya merujuk pada individu dengan karisma dominan yang lahir dari perpaduan keberanian, kekuatan fisik, dan keterampilan sosial dalam menyelesaikan masalah di luar jalur formal, Blater seringkali menggambarkan sebagai "pahlawan" atau "preman terhormat" yang memiliki kapasitas untuk melindungi kelompok atau individu yang meminta bantuan, meskipun harus menggunakan kekerasan atau ancaman. Reputasi ini, yang disebarakan dari mulut ke mulut, menumbuhkan rasa takut sekaligus rasa hormat. Blater seringkali terlibat dalam mediasi sengketa tanah, sengketa pribadi, atau kasus pidana ringan yang berada di luar jangkauan atau penyelesaian efektif penegakan hukum formal, menjadikan mereka semacam "penegak hukum" alternatif. Rekam jejak blater juga terlihat dalam kemampuan mereka memobilisasi massa; Dalam setiap pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum lainnya di Bangkalan, kehadiran blater dengan puluhan bahkan ratusan pengikut setia di acara-acara kampanye atau tempat pemungutan suara (TPS) bukanlah hal yang aneh. Para pengikut ini seringkali merupakan individu-individu yang memiliki ikatan patron-klien dengan blater, yang mengandalkan mereka untuk pekerjaan informal, perlindungan, atau pinjaman. Fenomena ini, sebagaimana terungkap dalam penelitian tentang politik lokal di Madura, menunjukkan bagaimana blater dapat berperan sebagai mesin perolehan dukungan elektoral dengan mengarahkan pilihan politik kepada kandidat yang membangun aliansi dengan jejaringnya (Ridho M.Z 2023).

Perbandingan dengan 3 Kabupaten Lainnya adalah Sampang memperlihatkan corak yang berbeda. Di sini, sejumlah kajian menggaris bawahi bahwa politik lokal lebih rentan pada dinamika koersif dan ketegangan sosial, terutama ketika kekuasaan informal bergerak dari sekadar "pengaruh" menjadi "tekanan". Sampang menunjukkan bagaimana intimidasi oleh blater dapat memengaruhi preferensi pemilih, yang berarti demokrasi prosedural (pemungutan suara) berjalan, tetapi kebebasan memilih dapat terdistorsi oleh relasi kuasa di tingkat akar rumput.

Kabupaten Pamekasan menunjukkan dinamika politik lokal yang relatif lebih plural dibandingkan wilayah Madura Barat seperti Bangkalan dan Sampang. Meskipun wilayah ini dikenal memiliki ekologi pesantren yang kuat dan jaringan kiai yang berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dominasi politik kiai tidak selalu secara otomatis menentukan hasil kontestasi elektoral. Dalam konteks Pilkada Pamekasan, perubahan perilaku politik masyarakat menunjukkan adanya ruang yang lebih terbuka bagi pemilih untuk menentukan pilihan politik secara lebih mandiri. Penelitian yang menelaah dinamika kekuasaan kiai dalam Pilkada Pamekasan menunjukkan bahwa pengaruh kiai sepuh dalam menentukan preferensi politik masyarakat mengalami penurunan, terutama seiring dengan perubahan konteks demokratisasi lokal dan meningkatnya rasionalitas pemilih dalam mempertimbangkan kandidat politik (Arifin, 2015). Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian lain yang menunjukkan adanya gejala pudarnya dominasi politik kiai dalam proses Pilkada di Pamekasan, di mana masyarakat tidak lagi sepenuhnya mengikuti arahan politik dari tokoh agama tertentu, melainkan mulai mempertimbangkan faktor lain seperti kapasitas kandidat, jaringan politik, serta kepentingan lokal yang berkembang dalam masyarakat (Suyatno, 2019). Dengan demikian, meskipun otoritas kiai tetap memiliki posisi penting dalam struktur sosial masyarakat Pamekasan, pengaruh tersebut tidak selalu bekerja sebagai satu komando tunggal dalam menentukan arah dukungan politik masyarakat.

Berbeda dengan Pamekasan, Kabupaten Sumenep memiliki karakter politik yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh kondisi geografis dan administrasi wilayah kepulauan. Secara administratif, Kabupaten Sumenep tidak hanya terdiri dari wilayah daratan di bagian timur Pulau Madura, tetapi juga mencakup puluhan pulau yang tersebar di wilayah kepulauan. Kondisi geografis ini menyebabkan arena politik di Sumenep menjadi lebih terfragmentasi secara spasial dan logistik. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep memiliki jumlah pulau yang cukup banyak dengan distribusi wilayah kepulauan yang tersebar di beberapa kecamatan, sehingga faktor geografis menjadi variabel penting dalam memahami dinamika politik lokal di daerah tersebut (BPS Kabupaten Sumenep, 2023). Dalam situasi seperti ini, mobilisasi politik tidak hanya

bergantung pada satu pusat kekuasaan di wilayah daratan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan broker politik lokal yang bekerja pada skala mikro di tingkat desa maupun pulau. Penelitian mengenai dinamika politik lokal di wilayah Kepulauan Kangean menunjukkan bahwa jaringan elite lokal memiliki peran penting dalam membentuk preferensi politik masyarakat kepulauan, terutama melalui relasi sosial yang terbangun dalam komunitas lokal (Rudiyanto, 2022). Selain itu, kondisi geografis kepulauan juga memunculkan tantangan tersendiri dalam proses penyelenggaraan pemilu, seperti keterbatasan akses informasi politik, kendala distribusi logistik pemilu, serta munculnya praktik politik uang di beberapa wilayah yang sulit dijangkau oleh pengawasan institusi formal (Hidayat, 2021). Oleh karena itu, dinamika politik di Sumenep tidak hanya ditentukan oleh aktor politik yang terlibat, tetapi juga oleh faktor ruang dan geografi yang membentuk pola jaringan politik di wilayah kepulauan.

Perbandingan dengan tokoh-tokoh serupa di daerah lain di Indonesia menunjukkan pola umum kekuatan informal, namun dengan karakteristik yang unik. Di **Banten**, misalnya, jawara merupakan tokoh yang serupa dalam hal keberanian dan kemampuan untuk melindungi masyarakat. Namun, studi antropologis dan sosiologis di Banten seringkali menyoroti bahwa legitimasi jawara lebih bertumpu pada keterampilan bela diri tradisional (silat) dan, seringkali memiliki hubungan yang erat dengan dimensi spiritual atau keagamaan, bahkan menjadi murid atau keturunan ulama. Jawara di Banten secara historis terlibat dalam membela kehormatan desa dan telah menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme atau ketidakadilan, sebuah peran yang dieksplorasi dalam berbagai karya sejarah lokal (Badriyanto, Y. 2015). Meskipun mereka juga dapat memobilisasi massa, pengaruh politik para pejuang modern mungkin tidak selalu sepribadi dan pragmatis blater Madura dalam mengarahkan suara massal, melainkan lebih pada representasi identitas atau dukungan simbolis. (Ridho, 2023).

Di lingkungan perkotaan yang lebih modern, kita menjumpai fenomena preman atau main hakim sendiri. tokoh-tokoh ini sering terlibat dalam penguasaan wilayah, jasa keamanan ilegal, atau bisnis ilegal di pasar, terminal, atau pusat hiburan malam. (Barker, J. 2001). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekuasaan mereka dibangun di atas intimidasi dan kekerasan fisik, dan mereka sering

dimanfaatkan oleh pengusaha atau politisi untuk melindungi kepentingan tertentu atau mengintimidasi lawan. Berbeda dengan blater Madura, yang dapat memiliki legitimasi ganda sebagai pelindung dan "pejuang", preman perkotaan umumnya memiliki konotasi yang lebih negatif dan jarang dipandang sebagai penegak keadilan sosial, kecuali di mata kelompok-kelompok kecil yang mereka layani. Lebih lanjut, konsep "orang kuat lokal" merupakan kategori yang lebih luas, mencakup beragam tokoh yang mendominasi politik lokal melalui kombinasi kekerasan, kendali sumber daya, dan jaringan patronase. Secara empiris, "orang kuat" ini, sebagaimana terlihat dalam studi oligarki lokal di banyak daerah, dapat memanfaatkan modal finansial mereka yang substansial, koneksi dalam birokrasi, dan kendali atas aparat keamanan informal mereka untuk memenangkan pemilu atau mempertahankan kekuasaan (Aspinall & Rohman, 2017). Pola ini serupa dengan yang juga ditemukan pada blater, tetapi mungkin dengan skala dan formalitas jaringan yang lebih besar.

Dengan demikian, blater di Madura merepresentasikan manifestasi spesifik dari fenomena kekuasaan informal. Meskipun secara fungsional serupa dengan jawara (jawa) Banten, preman kota, atau "orang kuat" lainnya dalam hal penggunaan kekerasan dan mobilisasi massa, mereka dibedakan oleh legitimasi sosial yang kuat, keterampilan mediasi, dan integrasi yang erat ke dalam struktur politik lokal, terutama melalui aliansi pragmatis dengan kiai. Rekam jejak empiris aktivitas para blater menunjukkan bahwa mereka adalah aktor nyata dan memiliki dampak signifikan dalam membentuk realitas sosial politik di Madura.

Interaksi antara kedua kekuatan informal ini kiai dengan legitimasi religius-moralnya dan blater dengan legitimasi fisik-sosialnya menciptakan lanskap politik lokal yang unik di Bangkalan. Mereka dapat saling berkooperasi dalam membentuk aliansi strategis untuk mendukung calon tertentu, saling bersaing dalam memperebutkan pengaruh, atau bahkan menjadi objek instrumentalisasi oleh para politisi yang berambisi. Relasi dinamis antara kiai dan blater ini secara langsung memengaruhi bagaimana calon kepala daerah memformulasikan strategi kemenangan, bagaimana mobilisasi pemilih dilakukan, dan pada akhirnya, bagaimana hasil Pilkada ditentukan.

Memahami relasi antara blater dan kiai dalam Pilkada Kabupaten Bangkalan menjadi krusial untuk mengungkap dimensi-dimensi kekuasaan informal yang seringkali tersembunyi di balik institusi dan prosedur demokrasi formal. Analisis ini tidak hanya akan memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas demokrasi lokal di Indonesia, tetapi juga mengidentifikasi bagaimana kekuatan-kekuatan non-formal ini dapat mendukung atau bahkan menghambat konsolidasi demokrasi yang substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam membaca peta kekuasaan politik di tingkat lokal serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi.

Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu Lukman Hakim–Fauzan Ja’far (nomor urut 1) dan Mathur Husairi–Jayus Maimun (nomor urut 2). Berdasarkan hasil suara Sah KPU, pasangan Lukman–Fauzan memperoleh sekitar 60,3 persen suara, sedangkan pasangan Mathur–Jayus meraih 39,7 persen suara. Dari total 764.886 pemilih tetap, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 71,34 persen (KPU Bangkalan, 2024).

Tabel 1

No.	Nama Calon	DPT Keseluruhan	Hasil Akhir
1.	Lukamul Hakim-Fauzan Ja’far	764.886 DPT Se- Kabupaten Bangkalan	60,17% 319.072 Suara
2.	Mathur Husairi-Jayus Maimun		39,83% 211.201 Suara

Sumber : (KPU Bangkalan 2024)

Di balik angka-angka tersebut, terdapat konfigurasi sosial dan kultural yang menentukan arah politik lokal. Pasangan Lukman–Fauzan dikenal memiliki kedekatan dengan sejumlah pesantren besar di wilayah tengah dan selatan Bangkalan, serta menerima dukungan dari beberapa Kiai kharismatik. (KPU Bangkalan, 2024)

Fakta ini diperkuat oleh sejumlah pemberitaan media lokal seperti (Regamedianews, 2024; Koran Madura, 2024) Bahwasannya Keterlibatan sejumlah kiai dalam Pilkada Bangkalan 2024 memperlihatkan secara jelas bagaimana otoritas religius berfungsi sebagai sumber pengaruh politik dalam konteks lokal. Dukungan terbuka dari KH. Abdullah Zubaer (Pengasuh Pesantren Nurul Cholil) dan KH. Nasih Askhol (Pengasuh Pesantren Syaikhona Kholil) terhadap pasangan Lukman Fauzan dan Ketua tim Pemenangannya adalah H. Hasani Bin Zubeir yang merupakan anak dari Kh. Abdullah Zubeir dan ini menunjukkan bahwa restu politik dari tokoh agama karismatik dapat menjadi faktor signifikan dalam membentuk orientasi politik masyarakat. Kehadiran para Kiai dan santri dalam kegiatan tersebut menunjukkan adanya konsolidasi jaringan keagamaan yang strategis bagi pasangan ini. Dan di sisi lain, Mathur Husairi Juga menggunakan Jaringan kiai untuk dijadikan Tim Pemenangan ada KH. Imam Bukhari yang sebelumnya mendklarasikan bahwasannya dia ingin maju untuk kontestasi pada pilkada bangkalan ini akan tetapi dia mengurungkan niatnya dan beliau adalah RAIS Suryah PBNU dalam pilkada Kabupaten bangkalan tersebut

Dengan demikian Dukungan Kiai dalam kontestasi politik lokal di Bangkalan tidak berhenti pada level simbolik atau moral semata, melainkan juga bersifat operasional dan strategis. Melalui medium ceramah, pengajian, hingga mobilisasi jamaah, Kiai memainkan peran aktif dalam mengarahkan pilihan politik masyarakat. Secara teoretis, masih diperlukan upaya untuk mengintegrasikan teori local strongmen, dan patron-client, dalam menjelaskan bagaimana dua bentuk kekuasaan informal ini beroperasi dalam satu sistem politik lokal. Keresahan akademik yang muncul adalah bahwa meskipun Pilkada dilaksanakan secara demokratis, mekanisme kekuasaan informal masih berperan besar dalam menentukan hasil politik dan arah kebijakan lokal. Pertanyaannya kemudian, apakah relasi antara Kiai dan blater memperkuat atau justru menghambat kualitas demokrasi lokal di Bangkalan?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Bagaimana struktur kekuasaan informal

di Kabupaten Bangkalan terbentuk melalui peran Kiai dan blater, serta bagaimana kedua figur ini membangun basis pengaruhnya dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Serta bentuk relasi kekuasaan antara Kiai dan blater, baik dalam konteks kerja sama politik maupun dalam bentuk persaingan untuk memperoleh pengaruh terhadap calon kepala daerah. Lalu interaksi kedua kekuatan informal ini dengan institusi politik formal seperti partai politik, birokrasi, dan lembaga penyelenggara pemilu, serta sejauh mana relasi tersebut memengaruhi strategi kampanye dan mobilisasi suara kandidat. Apa pengaruh kekuasaan informal Kiai dan blater terhadap perilaku pemilih di tingkat akar rumput, terutama dalam membentuk preferensi politik dan loyalitas elektoral masyarakat Madura yang dikenal religius dan berorientasi patronase. Lalu implikasi hubungan Kiai dan blater terhadap kualitas demokrasi lokal di Bangkalan, baik dalam hal kebebasan politik, partisipasi warga, maupun integritas penyelenggaraan Pilkada. Rumusan masalah ini memperluas cakupan analisis agar tidak hanya melihat hubungan personal antarfigur informal, tetapi juga bagaimana relasi tersebut berinteraksi dengan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah:

Bagaimana struktur dan dinamika kekuasaan informal antara Kiai dan Blater terbentuk dalam Pilkada Kabupaten Bangkalan 2024, serta bagaimana pengaruhnya terhadap proses dan Hasil demokrasi Lokal.?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

TUJUAN : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan karakteristik kekuasaan informal di Kabupaten Bangkalan dengan fokus pada peran Kiai dan Blater dalam Pilkada 2024. Tujuan khususnya meliputi identifikasi bentuk relasi, kolaborasi, maupun konflik antara Kiai dan blater dalam arena politik lokal; pemetaan interaksi mereka dengan struktur politik formal; dan penilaian terhadap sejauh mana kekuasaan informal memengaruhi perilaku pemilih serta hasil Pilkada.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami implikasi dari relasi kekuasaan informal terhadap kualitas demokrasi lokal dan proses konsolidasi politik daerah.

MANFAAT : Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga aspek utama.

1. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi politik lokal dan teori kekuasaan informal di Indonesia dengan mengintegrasikan konsep local, dan patron–client dalam konteks Madura.
2. secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan partai politik untuk memahami bagaimana kekuasaan non-formal mempengaruhi proses demokrasi, sehingga dapat dirancang kebijakan partisipasi politik yang lebih inklusif dan akuntabel.
3. secara akademik, penelitian ini dapat menjadi landasan empiris bagi kajian lanjutan mengenai hubungan agama, budaya, dan kekuasaan dalam demokrasi lokal Indonesia, serta menjadi referensi perbandingan dengan wilayah lain seperti Banten dan yang memiliki struktur kekuasaan informal serupa.
4. Secara keseluruhan, Pilkada Bangkalan 2024 bukan sekadar kompetisi elektoral antar calon bupati, tetapi juga arena pertarungan simbolik antara dua kekuasaan informal utama dalam masyarakat Madura: legitimasi spiritual Kiai dan legitimasi sosial Blater. Keduanya merepresentasikan dua wajah dari kekuasaan non-formal yang membentuk arah demokrasi lokal Indonesia demokrasi yang berjalan di antara nilai tradisi, patronase sosial, dan institusi formal negara.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penulisan ini, penulis akan membaginya ke dalam 6 bab yang saling berkaitan dan diuraikan secara sistematis, sistematika penulisannya sebagai berikut

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dinamika demokrasi lokal serta peran kekuasaan informal dalam Pilkada Kabupaten Bangkalan 2024.

Pembahasan diawali dengan menguraikan konsep demokrasi yang secara normatif bertumpu pada keberadaan institusi formal seperti partai politik, parlemen, dan proses pemilihan yang transparan namun dalam realitasnya, terlebih di tingkat lokal, praktik demokrasi kerap dipengaruhi oleh kekuatan non-formal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur informal yang bersumber dari tradisi, budaya, dan struktur sosial sering kali memainkan peranan penting dalam menentukan arah kompetisi politik. Kondisi ini tampak jelas pada pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah Indonesia, termasuk Bangkalan, yang menjadi ajang kompetisi sekaligus negosiasi antara elite formal dan figur-figur kekuasaan informal.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis mendefinisikan teori dan konsep yang relevan dan dipakai dalam analisis. Penulis juga mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang serumpun dengan pembahasan tulisan ini. Yang kemudian berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, penulis juga menjabarkan istilah-istilah atau kata kunci yang banyak dibahas dalam penelitian guna memberikan batasan dan pemahaman yang lebih jelas.

BAB III: METEDOLOGI PENELITIAN

Bab ini penulis menjelaskan secara sederhana mengenai pendekatan kualitatif yang akan digunakan, jenis penelitian, pengumpulan data sebagai pisau analisis ketika turun lapangan. Kemudian menjelaskan teknis yang dilakukan ketika melakukan analisis terhadap data yang nantinya dikumpulkan.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis menyajikan deskripsi data tentang gambaran umum masyarakat Madura dan gambaran Kiai dan Blater yang ada di Madura, Lalu Historis tentang kiai Dan Blater dari Kh. Cholil dan Sakera Sebagai Blater guna memperkuat pembahasan

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini Penulis membahas kekuasaan informal sebagai kemampuan aktor non-negara untuk memengaruhi perilaku dan pilihan politik masyarakat di luar jalur legal-formal. Kekuasaan ini bertumpu pada otoritas moral, jaringan sosial, patronase, dan reputasi bukan pada jabatan atau kewenangan administratif. Di sini dijelaskan perbedaan mendasar antara kekuasaan formal (berbasis aturan, lembaga, dan prosedur negara) dan kekuasaan informal (berbasis tradisi, kharisma, loyalitas, dan hubungan patron–klien), sekaligus menunjukkan bahwa dalam praktik politik lokal keduanya sering berkelindan dan saling menunggangi.

BAB VI PENUTUP

Dalam Bab ini Penutup disusun ke dalam dua bagian utama. Bagian pertama, yaitu Kesimpulan, memuat rangkuman temuan inti penelitian yang mencakup bagaimana kekuasaan informal bekerja dalam dinamika politik lokal Bangkalan, khususnya melalui peran kiai dan blater dalam Pilkada 2024. Bagian kedua, yaitu Saran, berisi rekomendasi bagi berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, tokoh informal